

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Uang selain sebagai alat pembayaran, juga berperan sebagai alat penyimpan kekayaan, alat satuan hitung dan sebagai ukuran alat pembayaran yang tertunda. Uang yang beredar dalam masyarakat dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu uang kartal (sering pula disebut sebagai *common money*) dan uang giral (Polontalo,2018).

Fungsi permintaan uang sering digunakan oleh Bank Sentral di berbagai negara sebagai salah satu alat untuk mengetahui target pertumbuhan uang atau jumlah uang beredar. Peningkatan jumlah uang beredar yang berlebihan dapat mendorong peningkatan harga melebihi tingkat yang diharapkan sehingga dalam jangka panjang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, apabila peningkatan jumlah uang beredar rendah maka kelesuan ekonomi akan terjadi (Setiadi,2012).

Sejalan dengan perkembangan informasi, teknologi dan komunikasi yang pesat, pola dan sistem pembayaran dalam transaksi ekonomi terus mengalami perubahan. Kemajuan dalam sistem pembayaran menggeser peranan uang tunai sebagai alat pembayaran ke dalam bentuk pembayaran non-tunai yang lebih efisien dan ekonomis.

Pembayaran non-tunai umumnya dilakukan tidak dengan menggunakan uang sebagai alat pembayaran melainkan dengan cara elektronik berupa transfer antar bank ataupun intra bank melalui jaringan informasi, teknologi dan

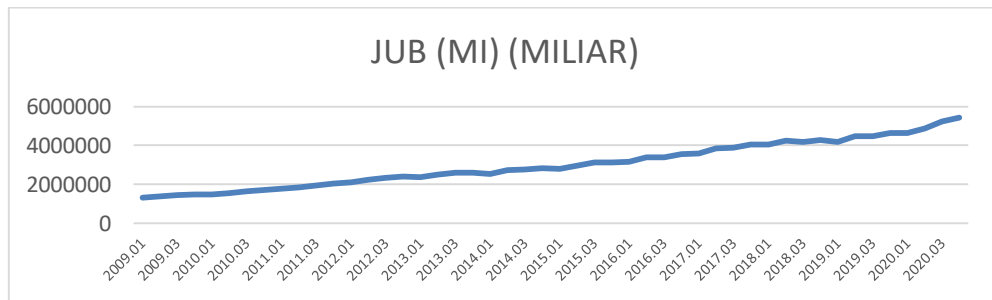
komunikasi. Pembayaran non-tunai juga dapat menggunakan kartu sebagai alat pembayaran, misalnya kartu kredit, kartu debit, *Automatic Teller Machine* (ATM), dan kartu Prabayar. (Ady, Ersha Miftakhul, 2016)

Berdasarkan Undang-Undang Mata Uang No. 7 Tahun 2011 tentang Penedaran Uang Rupiah, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengedarkan Uang Rupiah kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan jumlah uang dan ketentuan uang beredar diatur dengan

Peraturan Bank Indonesia. Penentuan jumlah uang beredar ini dihitung dengan mempertimbangkan berbagai hal yang mempengaruhi permintaan masyarakat akan uang untuk motif transaksi dan berjaga-jaga serta spekulasi. Bank sentral secara sederhana memiliki definisi sebagai bank yang memegang simpanan bank lain dan menggunakannya untuk settlement pembayaran antar bank (Singleton, 2011).

Pendistribusian uang yang diedarkan oleh Bank Indonesia harus diatur secara tepat untuk memenuhi permintaan masyarakat yang memerlukan. Jumlah uang yang berlebihan dapat menyebabkan terjadinya penurunan nilai uang atau peningkatan harga yang melebihi tingkat yang diharapkan, biasa disebut sebagai inflasi. Sedangkan bila jumlah uang yang diminta masyarakat melebihi jumlah uang yang diedarkan akan mengakibatkan melambatnya kegiatan perekonomian. (Polontalo, 2018)

Berdasarkan Grafik 1.1, terlihat bahwa perkembangan jumlah uang M1 mengalami peningkatan selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2020.



Gbr 1.1 Grafik Uang Beredar dalam triwulan 2009-2020 (*Dalam Miliar Rupiah*)

Selain itu dalam Undang-Undang No.3 tahun 2004, salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan dana dari satu pihak ke pihak lain yang melibatkan berbagai komponen seperti instrumen pembayaran (tunai dan non-tunai), bank, lembaga kliring, dan infrastruktur.

Kebijakan Bank Indonesia di bidang pembayaran tunai diarahkan untuk memenuhi ketersediaan uang kartal (uang kertas dan uang logam) dalam jumlah yang cukup dan pecahan yang sesuai, menjaga kualitas yang layak edar, melakukan tindakan untuk menanggulangi meluasnya peredaran uang palsu, dan meningkatkan pelayanan kas.

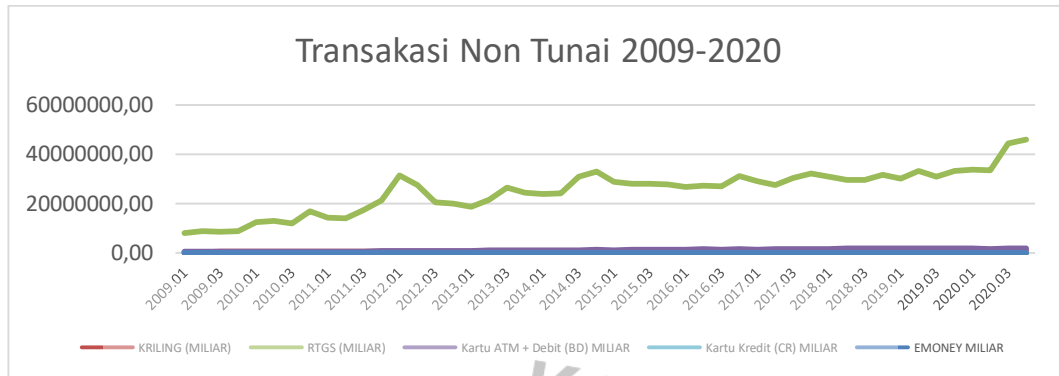
Sedangkan kebijakan Bank Indonesia di bidang pembayaran non-tunai adalah mengatur penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, baik sistem transfer dana antar bank yang bersifat real time (BI-RTGS), sistem kliring, maupun sistem pembayaran lainnya seperti sistem pembayaran berbasis kartu dalam mata uang Rupiah dan valuta asing (valas). Penyelenggaraan kliring tersebut dapat dilakukan secara langsung oleh Bank Indonesia atau oleh pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia.

Demikian juga dengan penyelesaian akhir transaksi kliring berupa pembayaran antar bank dalam mata uang Rupiah dan valas dilaksanakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia. Sejalan dengan perkembangan teknologi sistem pembayaran yang pesat, pola pembayaran tunai (*cash*) secara berangsur-angsur beralih menuju pembayaran non-tunai (*non-cash*) sehingga akan berpengaruh pada jumlah uang beredar (M1).

Sampai saat ini setidaknya terdapat tiga basis instrumen pembayaran non-tunai, yakni (1) alat pembayaran berbasis kertas (*paper based*), misalnya cek dan bilyet giro, (2) alat pembayaran *paperless* berupa transfer dana elektronik (*electronic based*) seperti (*e-money, internet banking, mobile banking dan QRIS*) (Oyewole,2013) dan (3) alat pembayaran memakai kartu (*card-based*) seperti ATM, Kartu Kredit, Kartu Debit dan Kartu Prabayar.

Berdasarkan Grafik 1.3 di bawah ini terlihat bahwa perkembangan transaksi pembayaran non-tunai melalui kliring, RTGS, kartu debit+atm dan kartu kredit secara rata-rata terus mengalami peningkatan selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2020. Penggunaan instrumen pembayaran non-tunai memberikan manfaat baik dari konsumen maupun dari segi operasional.

(Dalam Miliar Rupiah)



Gambar 1.2 Perkembangan Transaksi Pembayaran Non-Tunai tahun 2009-2020

Dari sisi konsumen, penggunaan instrumen non-tunai (*non-cash payment*) seperti *card based* dan *electronic based* saat ini sudah menjadi kebutuhan karena transaksi dapat dilakukan dengan praktis, cepat, dan nyaman. Bagi masyarakat, penggunaan pembayaran non-tunai dengan menggunakan kartu mempermudah transaksi mereka seperti transfer dana dan pembayaran berbagai tagihan rutin lainnya. Semua itu dilakukan tanpa harus datang ke *counter* atau kantor bank. Penggunaan instrumen non-tunai secara tidak langsung menimbulkan perubahan budaya masyarakat dari semula menggunakan instrumen tunai menjadi menggunakan instrumen non-tunai. Bagi bank atau penerbit, selain penggunaan instrumen pembayaran non-tunai dan berbagai derivatif produknya, merupakan salah satu cara untuk memperkuat daya saing bank, memperluas pasar, meningkatkan *fee-based income* dan memberikan layanan plus kepada nasabah.

Sedangkan dari sisi operasional, penggunaan *non cash instrument* akan mempercepat serta mempermudah penyelesaian transaksi dan berbagai kebutuhan

masyarakat dalam waktu yang sama, serta dengan biaya transaksi yang relatif lebih murah. Dengan berbagai kelebihannya, *e-banking* dan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) misalnya kartu ATM, kartu debit dan kartu kredit juga secara perlahan-lahan telah menjadi bagian integral dari sistem operasional perbankan dan merubah perilaku pelayanan bank kepada nasabah melalui konsep "*close to customer*" (Hirmawati, 2013).

Sistem pembayaran non-tunai di Indonesia dapat dibedakan menjadi (1) *Systematically Important Payment System* (SIPS), (2) *System Wide Important Payment System* (SWIPS) dan (3) sistem pembayaran yang bukan sebagai SIPS dan SWIPS. SIPS adalah sistem yang memproses transaksi-transaksi pembayaran yang bernilai besar dan apabila terjadi kegagalan dapat menimbulkan gangguan terhadap stabilitas sistem keuangan, contoh SIPS adalah sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS). Sementara itu, SWIPS adalah sistem pembayaran yang digunakan oleh masyarakat luas, yang apabila akan mengakibatkan ketidaknyamanan masyarakat dan pada gilirannya dapat menimbulkan turunnya kepercayaan masyarakat atas sistem dan alat-alat pembayaran yang diproses melalui sistem tersebut.

Di Indonesia yang termasuk kategori SWIPS adalah Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan penyelenggaraan alat pembayaran menggunakan kartu (APMK). (Siwinastiti,2014) Sementara sistem pembayaran yang bukan sebagai SIPS dan SWIPS contohnya adalah *money remittance*¹⁸. Perkembangan transaksi pembayaran non-tunai yang semakin pesat akan mempengaruhi perkembangan jumlah uang beredar.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menyampaikan bahwa QRIS yang mengusung semangat UNGGUL (UNiversal, GampanG, Untung dan Langsung), bertujuan untuk mendorong efisiensi transaksi, mempercepat inklusi keuangan, memajukan UMKM, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, untuk Indonesia Maju. Semangat ini sejalan dengan tema HUT ke-74 Kemerdekaan RI yaitu SDM Unggul Indonesia Maju.

QRIS UNGGUL mengandung makna, yaitu Pertama, UNiversal, penggunaan QRIS bersifat inklusif untuk seluruh lapisan masyarakat dan dapat digunakan untuk transaksi pembayaran di domestik dan luar negeri. Kedua, GampanG, masyarakat dapat bertransaksi dengan mudah dan aman dalam satu genggam ponsel. Ketiga, Untung, transaksi dengan QRIS menguntungkan pembeli dan penjual karena transaksi berlangsung efisien melalui satu kode QR yang dapat digunakan untuk semua aplikasi pembayaran pada ponsel. Keempat, Langsung, transaksi dengan QRIS langsung terjadi, karena prosesnya cepat dan seketika sehingga mendukung kelancaran sistem pembayaran.

QRIS disusun oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), dengan menggunakan standar internasional EMV Co.1 untuk mendukung interkoneksi instrumen sistem pembayaran yang lebih luas dan mengakomodasi kebutuhan spesifik negara sehingga memudahkan interoperabilitas antar penyelenggara, antar instrumen, termasuk antar negara.

Tingkat keberhasilan sistem pembayaran secara keseluruhan sangat tergantung pada kehandalan instrumennya, teknologi yang digunakan, dan jaringan komunikasi. Setiap distorsi yang timbul pada jaringan komunikasi akan

menimbulkan gangguan dalam sistem pembayaran yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Beberapa negara telah menggunakan dan mengembangkan *electronic money (e-money)*. Pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan *e-money* tidak selalu memerlukan proses otorisasi dan keterkaitan secara langsung (*online*) dengan rekening nasabah di bank. Hal ini karena *e-money* merupakan produk *stored value* dimana sejumlah nilai dana tertentu (*monetary value*) telah terekam (tersimpan) dalam alat pembayaran yang digunakan tersebut. Kehadiran alat pembayaran non-tunai tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh adanya inovasi perbankan akan tetapi juga didorong oleh kebutuhan masyarakat akan adanya alat pembayaran yang praktis yang dapat memberikan kemudahan dalam bertransaksi (Ramadani,2016)

Kemudahan transaksi tersebut dapat mendorong penurunan biaya transaksi dan pada gilirannya dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi (Widiastuti, 2012). Jumlah uang beredar (M1) juga dipengaruhi oleh beberapa variabel makro ekonomi seperti suku bunga, *Gross Domestic Product* dan Transaksi Non Tunai. Suku bunga yang tinggi menyebabkan jumlah uang beredar berkurang karena masyarakat cenderung menanamkan dananya di bank dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan sebaliknya suku bunga yang rendah menyebabkan jumlah uang beredar (M1) meningkat karena masyarakat lebih cenderung untuk memegang uang dalam bentuk *cash* atau menginvestasikan dananya dalam bentuk aktiva tetap (Sarton,2011) GDP mempunyai hubungan positif dengan jumlah uang beredar (M1), GDP meningkat menyebabkan jumlah uang beredar bertambah dan

sebaliknya GDP menurun menyebabkan jumlah uang beredar menurun.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan melakukan penelitian jumlah uang beredar akibat pengaruh transaksi pembayaran non-tunai, dan variabel makro ekonomi seperti suku bunga dan *Gross Domestic Product*, dengan judul "Pengaruh Transaksi Pembayaran Non-tunai, Suku Bunga dan Gross Domestic Product (GDP) Terhadap Jumlah Uang Beredar (M1) di Indonesia Periode 2009-2020.

1.2 Identifikasi Masalah

Perubahan cara pembayaran dari tunai ke non-tunai (melalui kliring, RTGS, kartu debit dan kartu kredit) secara langsung akan berdampak pada pergeseran jumlah uang beredar. Perkembangan transaksi pembayaran non- tunai diperkirakan akan mempengaruhi jumlah uang beredar.

Menurut definisi yang berlaku sampai saat ini M1, (*narrow money*) adalah sebagai uang untuk alat pembayaran, sehingga komponennya terdiri dari uang kartal dan uang giral. Sedangkan M2 adalah uang dalam arti luas (*broad money*) yang mencakup M1 dan tabungan (T) maupun deposito (D) (Istanto, 2013).

Transaksi pembayaran non-tunai melalui kartu kredit dapat menjadi substitusi bagi pembayaran tunai dan dapat mengurangi jumlah uang beredar (M1) ataukah justru kartu kredit digunakan sebagai media untuk memperoleh kredit sehingga akan menambah jumlah uang beredar (M1). Berkenaan dengan kondisi tersebut di atas dan studi yang pernah dilakukan baik untuk kasus di Indonesia maupun di negara lain, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai sampai seberapa jauh hubungan pembayaran non-tunai melalui kliring, RTGS, kartu debit dan kartu kredit terhadap jumlah uang beredar (M1) di Indonesia.

Mengingat perubahan jumlah uang beredar sangat terkait dengan kebijakan Bank Sentral yang diwujudkan dalam bentuk suku bunga Bank Indonesia, maka dalam penelitian ini, penulis juga akan meneliti bagaimana pengaruh suku bunga termasuk tingkat pendapatan nasional (GDP) terhadap jumlah uang beredar (M1) dan pengaruh suku bunga terhadap transaksi pembayaran non-tunai tersebut.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka diperoleh gambaran masalah yang luas. Namun, dengan keterbatasan waktu, sehingga penulis perlu memberikan batasan masalah secara jelas dan fokus pada penelitian. Adapun batasan-batasan yang digunakan yaitu transaksi pembayaran non-tunai melalui kliring, RTGS, kartu debit, kartu kredit, suku bunga dan GDP terhadap jumlah uang beredar (M1) dalam jangka panjang dan jangka pendek.

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh transaksi pembayaran non-tunai (melalui kliring, RTGS, kartu debit+ATM, kartu kredit), suku Bunga dan GDP terhadap jumlah uang beredar.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Bank Indonesia selaku otoritas moneter dalam mengambil kebijakan terkait dengan pembayaran non-tunai. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi studi-studi lain yang terkait dengan pembayaran non-tunai.

1.6 Sistematika Penulisan

Secara umum, sistematika penulisan disusun dengan kerangka sebagai

berikut :

Bab I : Memaparkan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Memaparkan tinjauan teori permintaan dan penawaran uang, dan studi empiris yang meliputi pembahasan tentang teori permintaan uang, jumlah uang beredar, penelitian terdahulu, dan sistem pembayaran.

Bab III : Memaparkan spesifikasi model dan metodologi penelitian yang menjelaskan tentang spesifikasi model penelitian, metode estimasi, data dan pengukuran variabel

Bab IV : Memaparkan hasil estimasi dan analisis serta penafsiran ekonomi dari hasil studi

Bab V : Penutup memaparkan kesimpulan hasil estimasi, temuan, implikasi kebijakan yang harus dilakukan, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian yang akan datang.